

LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Yola Annisah Silitonga, Ifah Rofiqoh, S.E, M.SI., AKT., CA

Abstrak

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, SKPD diberikan anggaran dan mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan pada setiap kegiatan akuntansi yang terjadi terhadap transaksi ekonomi pada bagian kinerja keuangan daerah tersebut sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa SKPD telah mengikuti format penyusunan laporan keuangan dan penyajian pelaporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melalui hasil dari penulisan ini kinerja keuangan pada perangkat daerah menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah sesuai melakukan proses pelaporan keuangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, SKPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

FINANCIAL REPORTING ON REGIONAL WORK UNITS IN THE
DEPARTMENT OF CAPITAL INVESTMENT AND ONE-DOOR
INTEGRATED SERVICES OF YOGYAKARTA CITY BASED ON MINISTER
OF HOME REGULATION NUMBER 77 OF 2020 CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

Yola Annisah Silitonga, Ifah Rofiqoh, S.E, M.SI., AKT., CA

Abstract

Regional Work Units (SKPD) are part of regional government that carry out government functions and public services. To carry out these main tasks and functions, SKPD is given a budget and has the obligation to record every accounting activity that occurs regarding economic transactions in the area's financial performance section so that it can produce financial reports. This financial report aims to find out that SKPD has followed the format for preparing financial reports and presenting financial reports at the Yogyakarta One Stop Integrated Service and Investment Service in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 and Government Regulation Number 71 of 2010. Through the results of In this writing, the financial performance of regional officials states that the Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Services Service has carried out the financial reporting process in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 and Government Regulation Number 71 of 2010.

Keywords: Financial Reporting, SKPD, Regional Government Accounting System.

